



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 839/XI/2014

I/NOVEMBER 2014



Pimpinan DPR Terima Menlu Retno Marsudi

Pimpinan DPR Terima Menlu Retno Marsudi

Pimpinan DPR RI menerima kunjungan silaturahmi Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja Retno Marsudi. Pertemuan membicarakan agenda pemerintah ke depan serta peran diplomasi parlemen dalam mendukung hal tersebut.

“DPR memberikan apresiasi atas pertemuan ini sebagai upaya membangun hubungan yang konstruktif di antara parlemen dan pemerintah khususnya bidang luar negeri. Peran Diplomasi DPR dijalankan dalam kerangka 3 fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/14).

Dalam kesempatan itu ia juga meminta Mantan Dubes RI di Belanda ini memberikan perhatian penuh pada empat isu penting yaitu perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, masalah perbatasan dan politik keamanan.

Disampaikan pula DPR mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian atas PP no.31/2013 tentang Peraturan Pelaksana UU no.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Menlu Retno Marsudi

tentang pihak-pihak yang ditunjuk untuk memperoleh paspor diplomatik.

Menlu Retno Marsudi mengatakan pertemuan silaturahmi ini merupakan awal yang baik bagi pemerintah dan parlemen dalam bekerja sama melaksanakan politik luar negeri demi kepentingan rakyat dan bangsa. Ia juga berjanji akan menjadikan perlindungan bagi warga negara di luar negeri sebagai prioritas.

“Beberapa isu yang disampaikan Pak Ketua memang jadi prioritas politik

luar negeri Indonesia termasuk perlindungan bagi Warga Negara Indonesia itu jadi perhatian kita,” tutur Retno yang datang didampingi Wakil Menlu Abdurrahman Mohammad Fachir.

Menlu perempuan pertama Indonesia ini juga menyebut sudah menerima surat dari Sekjen DPR yang menyampaikan rencana pertemuan anggota parlemen terkait *Millennium Development Goals* (MDGs) di Surabaya dalam waktu dekat. “Kami siap mendukungnya,” demikian Retno. (iky)/foto:andri/parle/hr.

Politisi Golkar Roem Kono Pimpin BURT DPR

Politisi Partai Golkar Roem Kono terpilih menjadi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI, dalam pemilihan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (30/10). Dalam acara pemilihan ini, mendampingi Roem Kono sebagai Wakil Ketua BURT adalah Novita Wijayanti dari Fraksi Gerindra dan Agung Budi San-

toso dari Fraksi Partai Demokrat.

Pemilihan Pimpinan BURT mengacu pada UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 97 ayat (2) dan Peraturan DPR No.1/2014 tentang tata tertib pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), maka paket nama Pimpinan BURT yang

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantungtyastiti, M. Si (**Sekretaris Jenderal DPR-RI**) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (**Kabag Pemberitaan**) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (**Kasubag Penerbitan**), Mediantoro SE (**Kasubag Pemberitaan**) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Effendi | **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri Nurdriansyah | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

diajukan adalah ketiga nama tersebut. Karena hanya satu paket, maka rapat BURT secara aklamasi menyetujui dan Pimpinan rapat mengetok palu sebagai tanda pengesahan salah satu alat kelengkapan dewan tersebut.

Seusai pemilihan, BURT menggelar rapat intern dipimpin Ketua Roem Kono dengan agenda antara lain pengenalan masing-masing anggota dan membahas program kerja yang akan datang, termasuk mengundang jajaran Setjen DPR yang dijadwalkan Senin yang akan datang.

Menjawab pers Ketua BURT Roem Kono mengatakan, proses pemilihan Pimpinan BURT sudah sesuai dengan tata tertib DPR dan pekan depan akan menggelar rapat guna menyusun jadwal program kerja. Rapat segera dilakukan karena berlomba dengan waktu apalagi alat kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, juga perangkat kesekretariatan menjadi perhatian BURT.

Dikatakan Roem Kono, DPR adalah rumah rakyat dan harus dikembalikan kewibawaannya sebagai lambang negara yang dihuni oleh 560 pejabat negara. Karena itu memang perlu perbaikan baik sarana-prasarana yang memadai sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan palu kepemimpinan kepada Ketua BURT yang baru Roem Kono

“DPR adalah rumah rakyat, representasi rakyat sehingga kinerjanya harus ditingkatkan. Karena itu penunjang kerja harus disupport betul-betul sehingga hak-hak dan kewajibannya bisa dilaksanakan secara memadai,” kata Roem Kono menambahkan. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr

Teuku Riefky Harsya Pimpin Komisi X DPR



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah foto bersama Pimpinan Komisi X terpilih

Politisi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya terpilih secara aklamasi untuk memimpin Komisi X DPR RI. Demikian hasil keputusan rapat internal Komisi X yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara I, Rabu (29/10/14).

Mendampingi Riefky sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR secara berturut-turut adalah Ridwan Hisyam (F-Partai Golkar), Nuroji (F-Partai Gerindra), dan Sohibil Iman (F-Partai Keadilan Sejahtera).

Usai disahkan, seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X memperkenalkan diri masing-masing. Suasana tampak akrab dan hangat, bahkan sesekali diwarnai canda tawa. Dari

pengamatan Tim Parle, nampak beberapa Anggota Komisi X periode sebelumnya, yang kembali duduk di Komisi yang membidangi pendidikan ini.

Ditemui usai memimpin rapat, Riefky mengaku pihaknya siap untuk bekerja secara maksimal. Namun, karena masih ada perubahan nomenklatur Kementerian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, sehingga Komisi X masih menunggu arahan dari Pimpinan DPR.

“Kami masih menunggu kabar terkait perubahan nomenklatur kementerian, karena memang ada perubahan mitra kerja Komisi X. Seperti Perguruan Tinggi yang digabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, sementara sebelumnya Kementerian Ristek adalah mitra Komisi VII, sedangkan Dikti adalah mitra Komisi X,” jelas Riefky.

Sebagai permulaan, ia akan memimpin rapat internal pimpinan Komisi X pada Kamis (30/10/14), dilanjutkan rapat internal Komisi X pada Senin (3/11/14). Rapat internal ini akan fokus pada penyusunan agenda dan program kerja Komisi X.

“Kami akan rapat pimpinan untuk mulai menyusun agenda kerja yang akan ditawarkan dengan anggota Komisi X. Kami juga akan menawarkan program kerja kepada seluruh anggota, jika itu disetujui, maka akan menjadi program kerja Komisi X di masa persidangan nanti,” imbuh Riefky. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

Nurhayati Pimpin BKSAP DPR

Nurhayati Ali Assegaf Anggota F-PD DPR terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Bersama Nurhayati, terpilih pula 3 wakil ketua BKSAP, Teguh Juwarno (F-PAN), Meutya Viada Hafid (F-PG), dan Rofi Munawar (F-PKS).

Rapat pemilihan pimpinan BKSAP, Kamis (30/10), dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dalam rapat pemilihan tersebut hanya ada satu paket pimpinan yang diajukan, sehingga sesuai Tatib DPR Pasal 74 ayat (13), paket tersebut langsung ditetapkan sebagai pimpinan BKSAP yang baru. Dengan demikian, Nurhayati yang juga anggota Komisi I DPR akan memimpin BKSAP untuk 5 tahun ke depan.

Rapat penetapan pimpinan BKSAP tersebut hanya dihadiri 5 fraksi,

yaitu F-PG, FPAN, F-PD, F-PKS, dan F-Gerindra. 5 fraksi lainnya tidak hadir, F-PDI Perjuangan, F-PPP, F-PKB, F-Hanura, dan F-Nasdem. Ada 28 anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota BKSAP. F-PG 8 anggota, F-Gerindra 7 anggota, F-PD 5 anggota, F-Pan 4 anggota, dan F-PKS 4 anggota.

Di antara para anggota yang masuk menjadi anggota BKSAP, yaitu Siti Hediati Soeharto (F-PG), Rachel Maryam Sayidina (F-Gerindra), Melani Leimena Suharli (F-PD), Venna Melinda (F-PD), dan Hanafi Rais (F-PAN). Usai terpilih, Nurhayati langsung memimpin rapat pleno BKSAP untuk



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyerahkan palu kepemimpinan kepada Nurhayati Ali Assegaf

mempersiapkan agenda-agenda yang harus segera dijalankan BKSAP. Di antaranya menghadiri pertemuan MDGs di Surabaya pada 12-13 November 2014. (mh) foto : andri/parle/hr.

Mahfudz Sidiq Kembali Pimpin Komisi I



Pimpinan Komisi I DPR terpilih

Paket Pimpinan Komisi I DPR terdiri Ketua, Mahfudz Sidiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, para Wakil Ketua Tantowi Yahya dari Fraksi Partai Golkar, Asrill Hamzah Tandjung dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Hanafi Rais dari Fraksi Amanat Nasional, ditetapkan menjadi Pimpinan Komisi I DPR dalam Rapat yang dipimpin Wakil

Ketua DPR Fadli Zon, Rabu (29/10).

Pimpinan rapat Fadli Zon mengemukakan, mengingat usulan calon paket Pimpinan Komisi I DPR hanya terdapat satu paket calon pimpinan Komisi, maka sebagaimana ketentuan tatib DPR pasal 57 ayat 13, paket calon Pimpinan Komisi langsung ditetapkan

menjadi pimpinan Komisi.

“Apakah paket Pimpinan Komisi I DPR sebagaimana tersebut diatas dapat disetujui sebagai Pimpinan Komisi I DPR?, tanya Fadli dandijawab dengan serentak oleh para anggota Komisi I DPR, Setuju..... Disusul ketok palu sebanyak 3 kali, sebagai tanda sahnya pemilihan tersebut.

Menurut Fadli Zon, ketentuan yang diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib terkait dengan tata cara pemilihan Pimpinan Komisi diatur dalam pasal 57 bahwa Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Komisi terdiri atas satu orang Ketua dan paling banyak 3 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dan berlaku selama 5 tahun.

Ketua Komisi I terpilih Mahfudz Sidiq dalam sambutannya mengatakan, hari ini kita telah menyelesaikan salah satu tugas konstitusional yaitu pemilihan

dan penetapan Pimpinan Komisi I DPR untuk periode 2014-2019.

“Kami dari meja pimpinan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Walaupun kami diberi amanat sebagai pimpinan, pada hakekatnya semua anggota Komisi

I DPR adalah pimpinan, cuma membagi tugas dalam mengatur kerja-kerja Komisi I DPR,” katanya.

Ada satu tradisi yang baik, yang diwariskan oleh Komisi I periode 2009-2014, kata Mahfudz, walaupun beragam Fraksi tetapi karena Komisi

I DPR lebih banyak berbicara tentang NKRI, diplomasi luar negeri, tentang pertahanan maka kita mengikatkan diri dalam satu keluarga besar, dan mempunyai kepentingan nasional yang sama. (spy) foto:andri/parle/hr

Dede Yusuf Pimpin Komisi IX DPR

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menetapkan Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi IX DPR, Rabu (29/10) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Selain Dede Yusuf, dalam rapat tertutup penetapan Pimpinan Komisi IX, Fahri Hamzah menetapkan pula tiga orang Wakil Ketua Komisi IX DPR, yaitu Syamsul Bachri (F-PG), Pius Lustrilanang (F-Gerindra), dan Asman Abnur (F-PAN).

Kepada media, Ketua Komisi IX terpilih, Dede Yusuf menyatakan penetapan pimpinan Komisi IX sudah sesuai Tata Tertib DPR RI.

“Jadi sebetulnya mekanisme pemilihan sudah dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPR RI, bahwa yang mendaftarkan anggota-anggota itu sudah 6 Fraksi, dan dari 6 Fraksi itulah dihitung 50%+1 nya yaitu 4 Fraksi, itu sudah terpenuhi. Anggota pun sudah hadir 27 anggota sudah terpenuhi unsur 50%+1,” papar Dede Yusuf.

Berdasarkan hal tersebut, jelas Dede Yusuf, tadi sudah dilaksanakan suatu proses pemilihan yang ternyata hanya ada satu paket yang sudah ditetapkan Pimpinan DPR.

“Sesuai Tata Tertib adalah 50%+1 dari jumlah anggota dan 50%+1 dari yang mendaftarkan,” tandasnya.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berjabat tangan dengan Ketua Komisi IX terpilih Dede Yusuf

Dede Yusuf menambahkan bahwa pemilihan pimpinan Komisi-komisi hari ini sudah dilaksanakan di semua komisi dan sudah barang tentu semua keputusan harus ditetapkan di Paripurna DPR RI. (sc)/foto:iwan armanias/parle/hr

Pimpinan Komisi II Resmi Ditetapkan



Jajaran Pimpinan Komisi II DPR terpilih

Wakil Ketua DPR Fadli Zon secara resmi, Rabu, (29/10) menetapkan Calon Pimpinan Komisi II DPR sebagai Pimpinan Komisi II DPR.

“Karena hanya 1 (satu) paket calon pimpinan Komisi yang diajukan, sekarang tibalah, saya selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi II DPR, apakah paket calon pimpinan Komisi II DPR dapat disetujui?,” tanya Fadli Zon, “Setuju...” sahut anggota Komisi II, dan palu diketuk.

Seperti diketahui, sebelumnya 5 fraksi di Komisi II DPR yaitu Fraksi Partai Golkar, F-Gerindra, F-Demokrat, F-PKS, dan F-PAN sepakat mengajukan 1 paket calon pimpinan Komisi II DPR yaitu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman (F-PG), dan Wakil Ketua Komisi II DPR yaitu Ahmad Riza Patria (F-Gerindra), Wahidin Halim (F-PD), dan Mustafa Kamal (F-PKS),

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura tidak tampak didalam ruang rapat Komisi II DPR. Dan akhirnya pengajuan nama-nama calon pimpinan tersebut disahkan menjadi pimpinan Komisi II DPR. (nt)/foto:andri/parle/hr

DPR Hargai Hak Prerogatif Presiden



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla beserta Pimpinan DPR saat memberikan keterangan pers di Istana

Saling menghargai antara DPR dan Presiden sangat terlihat dari pertemuan Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Presiden sangat menghargai kerja cepat Pimpinan DPR yang telah memberi pertimbangan soal nomenklatur. Dan DPR pun menghormati hak prerogatif Presiden.

“Kami selaku Pimpinan DPR telah menyerahkan surat pertimbangan dimana surat itu membalas surat Presiden yang diserahkan pada kami pada tanggal 21 Oktober. Tentunya kami sangat mengapresiasi Bapak Presiden. Ini jelas hak prerogatif Presiden sesuai UUD pasal 17 ayat 4 bahwa Presiden bisa melakukan penyusunan dan penggabungan yang berkaitan Kementerian Negara,” ujar Ketua DPR Setya Novanto saat konferensi pers bersama Presiden di Istana.

Pertemuan yang berlangsung Minggu (26/10), dihadiri 3 Wakil Ketua DPR, yaitu Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden Jokowi juga secara terbuka menyampaikan apresiasinya kepada Pimpinan DPR yang telah menyampaikan pertimbangannya menyangkut perubahan nomenklatur kabinet yang dilakukan Presiden.

“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi kerja dari dewan, karena sangat cepat direspon kemudian cepat dijawab sehingga bisa memudahkan pekerjaan kami selanjutnya untuk mengumumkan kabinet dan segera melantik menteri-menteri yang ada,” kata Jokowi pada konferensi pers tersebut.

Setya Novanto kepada pers juga menyatakan, permintaan pertimbangan dari Presiden soal nomenklatur kepada DPR merupakan niat baik yang perlu dihargai. Selanjutnya, DPR mempersilakan Presiden untuk membentuk kabinet tanpa perlu diintervensi oleh DPR. Dalam posisinya sebagai Ketua DPR, lembaga yang dipimpinnya sangat menghormati hak prerogatif Presiden.

“Tentu dalam hal perubahan-perubahan ini, kami telah sampaikan bahwa perlu dipertimbangkan dan diperhatikan adanya masalah yang berkaitan dengan *money follow function* dan *action follow policy*. Kepada Bapak Presiden kami mohon dipertimbangkan dan diperhatikan yang berkaitan dengan implikasi terhadap masalah anggaran, sosial, dan politik,” ungkapnya. (mh, sf)/foto:denus/parle/hr

Pimpinan Komisi II DPR Akan Langsung Bekerja



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Komisi II DPR

Setelah terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman dari F-PG menyatakan bahwa pimpinan yang telah terpilih dan terbentuk ini akan langsung bekerja serta melakukan konsolidasi.

“Kami berterima kasih atas dukungan yang telah diberi-

kan, dan kalau ditugaskan secara tulus itu sudah luar biasa, demi kemajuan bangsa dan Negara tidak ada hal lain,” tegasnya usai menerima palu sidang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu, (29/10).

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria dari F-Gerindra mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Serupa dengan Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal menyatakan bahwa dirinya dan pimpinan yang lain sama-sama sedang belajar.

“Saya mohon masukannya, karena tantangan di Komisi II ini, saya kira tidak ringan, apalagi target-target dari Presiden Joko Widodo dengan kerja-kerja itu, dan tentu kita juga harus menjadi mitra yang mungkin lebih keras lagi dalam bekerja,” tegas Mustafa politisi PKS yang memasuki periode ke 3 menjadi anggota DPR RI. (nt)/foto:andri/parle/hr

Penolakan Terhadap Pejabat Harus Ikuti Aturan

Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden, masih terus berlangsung. Bahkan, aspirasi itu pun sampai di Pimpinan DPR.

Bertempat di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon menerima sejumlah perwakilan persatuan ulama Indonesia. se-DKI Jakarta. Para ulama itu menyampaikan beberapa keresahan terkait Ahok yang saat ini menjabat Plt Gubernur Jakarta.

Para ulama ini diwakili oleh Ketua Majelis Syuro FPI Misbahul Anam, Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhsin Ahmad Alatas, perwakilan Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan, Ketua Habib Muda Jakarta, Ketua Forum Betawa Bersatu, serta Sekretaris Jendral MUI.

“Penolakan terhadap Ahok itu hak demokrasi. Setiap orang berhak menolak gubernur atau wakil gubernur, namun harus tetap berpegang kepada konstitusi, aturan main, atau Undang-undang, atau dalam hal ini peraturan pengganti undang-undang. Jadi, sah-sah saja jika mereka mengkritisi gubernur, wakil gubernur, anggota DPR, bahkan sampai presiden,” jelas Fadli, Selasa (28/10/14).

Dalam kesempatan itu, diskusi juga membahas tentang aliran sesat yang cukup meresahkan masyarakat. Fadli menjamin, DPR juga konsen terhadap aliran agama baru yang meresahkan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima sejumlah perwakilan Persatuan Ulama Indonesia

masyarakat, pasalnya, selain tidak diakui oleh negara, juga dapat membahayakan.

“Terlalu banyak aliran-aliran agama yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, dengan mencampuradukkan agama, ini dapat meresahkan umat agama yang sudah diakui oleh negara. Harus ada pembatasan terhadap aliran atau sekte yang meresahkan, dan ini berlaku terhadap semua agama yang diakui di Indonesia. Saya kira ini akan menjadi kajian di Komisi VIII, terkait dengan aspirasi terkait agama,” tambah Fadli.

Sebelumnya, para ulama menyampaikan bahwa mereka mewakili umat muslim di Jakarta untuk menolak Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Misbahul

menilai, Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, sehingga pemimpinnya haruslah muslim. Jika tidak, berarti negara melanggar hak mereka dalam menganut dan menjalankan agama. Sebagaimana diketahui, Ahok adalah non muslim.

Bahkan, untuk penolakan ini, organisasi Islam se-DKI Jakarta akan melakukan aksi damai di Balai Kota Jakarta, pada 10 November 2014 besok. Tak tanggung-tanggung, mereka akan menurunkan 100 ribu orang.

“Penolakan ini harus berjalan dengan tertib, damai, dan dalam koridor yang ada. Jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan korban jiwa,” imbuh Fadli. (sf) foto:andri/parle/hr

Terpilih Empat Pimpinan Komisi VIII

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA), Fahri Hamzah memimpin rapat pemilihan pimpinan Komisi VIII DPR RI yang menjadi bagian dari bidang yang dikoordinatorinya, Rabu (29/10). Hal tersebut dilakukannya setelah Fraksi PPP menyerahkan daftar nama anggota di semua komisi dan alat kelengkapan dewan pada Sidang Paripurna sehari sebelumnya.

“Sesuai Tata Tertib yang berlaku karena sudah memenuhi kourum, dalam daftar yang hadir disini ada 30 orang, maka hari ini kita dapat memilih Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Silahkan yang ingin memberikan usulan nama calon Pimpinan untuk disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI.

Setelah seluruh perwakilan fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI membacakan dan menyerahkan hasil keputusan par-



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Komisi VIII terpilih

tai masing-masing terkait paket Pimpinan Komisi VIII, maka disepakati dan diputuskan bersama Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi PAN menjadi Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerinda, dan Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Atas terpilihnya Pimpinan Komisi VIII DPR RI tersebut, Fahri Hamzah mengucapkan selamat dan semoga pimpinan bisa bersinergi dengan anggota Komisi lainnya serta berbagai mitra kerjanya. Tak lupa Fahri berharap agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi VIII dapat mengemban amanah rakyat dengan baik. (Ayu)/foto: iwan armanias/parle/hr

DPR Apresiasi Dibentuknya Kemenristek dan Dikti

Anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno mengapresiasi positif penggabungan Kementerian Ristek dengan Dikti di kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-JK.

“Yang pasti pembentukan Kementerian tersebut sebagai upaya membangun link and match antara Pendidikan tinggi dengan Ristek,” ujar Teguh saat diwawancarai oleh Parlemen, di Gedung DPR, Kamis, (29/10).

Menurut anggota Komisi X DPR ini, hal itu merupakan sebuah terobosan baru yang harus kita tunggu dan cukup menjanjikan. “Berdasarkan pengalaman membangun kelembagaan atau birokrasi baru butuh waktu cukup



Anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno

lama bahkan mencapai enam bulan,” katanya.

Dia menambahkan, penggabungan Pendidikan tinggi dan Ristek membuktikan adanya perhatian yang besar khususnya perguruan tinggi yang memiliki *link and match* dengan dunia kerja.

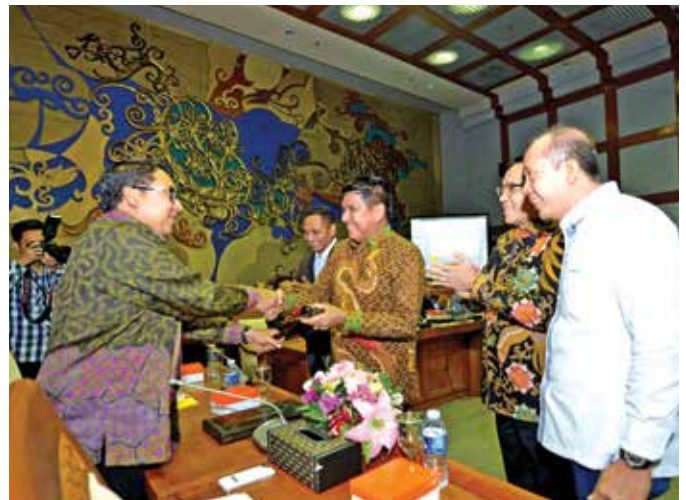
“Implikasi dari reorganisasi tersebut tentu harus dilakukan revisi anggaran apalagi kementerian Kemristek itu sebuah kementerian digabungkan dengan direktorat jenderal,”ujarnya.

Teguh mengatakan, isu kelembagaan tentunya akan besar karena terkait penganggarannya di DPR. “Tentu nanti akan ada penggabungan dan pengurangan Dirjen terkait organisasinya,” jelasnya. (si). foto: iwan armanias/parle/iw

Sareh Wiyono Terpilih Jadi Ketua Baleg

“Meski baru masuk sebagai anggota DPR, namun Pak Sareh punya pengalaman dan latar belakang hukum yang cukup panjang. Oleh karena itu dengan terpilihnya Pak Sareh sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) saya kira dapat memimpin Baleg menyelesaikan beberapa prolegnas (program legislasi nasional) baik berupa Undang-undang, maupun kajian terhadap revisi UU,” jelas Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Fadli Zon usai memimpin rapat pemilihan pimpinan Baleg DPR RI, Kamis (30/10) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Dalam paket pimpinan yang diusulkan fraksi-fraksi di DPR tersebut, Sareh Wiyono, anggota Fraksi Partai Gerinda DPR RI terpilih menjadi Ketua Baleg. Selain Sareh, ada tiga nama yang akan mendampingi menjadi wakil ketua Baleg, yakni Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar, Saan Mustofa dari Fraksi Partai Demokrat, dan Totok Daryanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan ucapan selamat kepada Ketua Baleg terpilih

Dikatakan Fadli, ada berbagai PR (Pekerjaan rumah) yang harus segera diselesaikan Baleg. Salah satunya yang menyangkut masalah internal DPR terkait Tenaga Ahli yang hingga sekarang diakuinya masih simpang siur statusnya. Selain itu berbagai penyelesaian Prolegnas juga harus segera disele-

saikan, meskipun saat ini RUU banyak berasal dari inisiatif Komisi-komisi, namun sesuai Tupoksinya harmonisasi dan sinkronisasi tetap berada di Baleg.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Sareh Wiyono mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan anggota Baleg

dan fraksi-fraksi yang ada untuk memimpin Baleg. Dengan dukungan seluruh anggota Baleg yang ada ia berjanji untuk menjalankan tugas dan fungsi Baleg dengan baik. (Ayu)/foto:andri/parle/hr

Fary Djemy Francis Dilantik Jadi Ketua Komisi V DPR

Fary Djemy Francis dilantik menjadi Ketua Komisi V DPR RI yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, dan Meteorologi.

Rapat Komisi V DPR tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, di Gedung Nusantara, Kamis, (30/10).

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengucapkan terima kasih terhadap anggota yang mengusulkan paket nama anggota Komisi V DPR. "Kita sudah tidak asing lagi dengan pimpinan lainnya, apalagi saya berada disamping Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said yang sudah hampir lima periode di DPR," ujarnya.

Dia mengatakan, kita perlu sama-sama satu pemahaman dan segera berunding di Komisi V DPR. "Kita intinya ingin segera bekerja sesuai slogan pemerintahan Joko Widodo, yang pertama kita ingin Rapat pimpinan dahulu setelah itu akan kita sampaikan kepada anggota lainnya untuk rapat internal," tandasnya.

Dia menambahkan, kesepahaman juga harus dibangun



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Komisi V terpilih

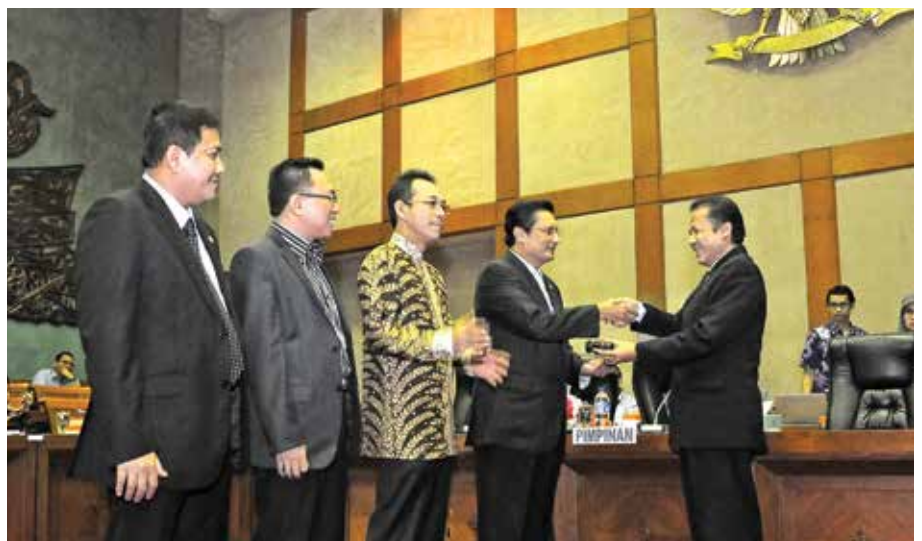
bagi teman-teman Fraksi yang belum bergabung di Komisi V DPR. "Kebersamaan itu yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Rapat tersebut menetapkan paket pimpinan yaitu Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis (Gerindra), Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said (Fraksi Partai Golkar), Michael Watimena (F-PD), Yudi Widiana Adia (F-PKS). (si) foto: naefuroji/parle/hr

Empat Pimpinan Komisi XI Ditetapkan

Empat pimpinan Komisi XI DPR telah ditetapkan. Terpilih secara aklamasi Fadel Muhamad (F-Partai Golkar) menjadi Ketua Komisi XI DPR, didampingi oleh tiga Wakil Ketua Komisi XI, yaitu Gus Irawan Pasaribu (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya), Marwan Cik Asan (Fraksi Partai Demokrat), dan Jon Erizal (Fraksi Partai Amanat Nasional).

Dalam rapat terbuka yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Keuangan dan Ekonomi (KOREKKU) Taufik Kurniawan, lima fraksi telah menyampaikan usulan satu paket pimpinan. Dengan hanya diajukannya satu paket pimpinan, maka sesuai Tatib DPR Pasal 74 ayat (13), maka bisa dipas-



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Komisi XI terpilih

tikan Fadel akan memimpin Komisi XI sampai lima tahun mendatang.

“Hanya ada terdapat satu paket pimpinan, karena sampai saat ini Pimpinan DPR hanya menerima satu usulan paket sampai dilaksanakannya rapat Komisi ini. Kami mohon persetujuan. Apakah usulan dari lima fraksi ini dapat disetujui menjadi pimpinan Komisi XI dapat disetujui?” tanya Taufik kepada seluruh Anggota Komisi XI yang hadir di Gedung Nusantara I, Ka-

mis (30/10/14). Jawaban “Setuju”pun terdengar menggema.

Rapat penetapan Pimpinan Komisi XI ini hanya dihadiri lima fraksi, yaitu F-PG, FPAN, F-PD, F-PKS, dan F-Gerindra. Sedangkan, lima fraksi lainnya tidak hadir, seperti F-PDI Perjuangan, F-PPP, F-PKB, F-Hanura, dan F-Nasdem.

Anggota Dewan yang hadir yaitu enam orang dari delapan orang dari F-PG, enam orang dari F-Gerindra,

F-PD lima orang, dan masing-masing empat orang dari F-PKS dan F-PAN. Sehingga seluruh anggota Komisi XI yang hadir berjumlah 25 orang.

Usai penyerahan palu dari Pimpinan DPR kepada Pimpinan Komisi XI, Fadel langsung memimpin rapat internal Komisi XI, yang berisi perkenalan dan tukar pendapat dari seluruh anggota Komisi XI. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

MKD, Banyak Bekerja Sedikit Bicara



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyerahkan palu kepemimpinan kepada Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKES-RA) Fahri Hamzah memimpin rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan. Dalam rapat di Ruang Pleno MKD, Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/14) ter-

pilih sebagai Ketua Surahman Hidayat dari Fraksi PKS dan Wakil Ketua Lili Asdjudiredja (FPG), Sufmi Dasco Ahmad (FPGerindra).

Pemilihan dalam pleno tertutup tersebut dihadiri oleh 10 orang anggota dari tujuh belas anggota yang

diatur berdasarkan UU MD3. Tujuh anggota lain yaitu dari FPDIP, FP Hanura, FP Nasdem dan FPKB belum menyerahkan daftar nama sedangkan FPPP sudah menyerahkan daftar nama tetapi berhalangan.

Usai acara Surahman Hidayat kepada wartawan mengatakan akan mengemban amanah dengan penuh hikmah. “MKD ini diharapkan punya semangat, keberanian tetapi juga punya wise (bijaksana) sehingga kita lebih banyak bekerja dari pada membuat statement. Menangani dengan tertib tidak emosional, penuh hikmah agar bisa mengelola masalah tidak dengan masalah,” tekannya.

Mantan Ketua BKSAP ini sekaligus menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mendukung kinerja MKD menjaga marwah dan kehormatan anggota DPR dengan memberikan masukan. Publik menurutnya juga mempunyai tanggung jawab agar para wakilnya di Senayan dapat bekerja dengan baik.

Sementara itu anggota MKD dari Fraksi Partai Demokrat Darizal Basyir menekankan segera setelah pimpinan ditetapkan akan langsung bekerja. Purnawirawan TNI dengan pangkat Kolonel ini mengimbau anggota MKD dari Koalisi Indonesia Hebat segera bergabung dan mulai bekerja.

“Kita terus mengupayakan komunikasi politik terus berjalan. Kita mengajak kawan-kawan dari fraksi lain segera bergabung agar MKD segera berfungsi dengan efektif,” pungkask dia. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr



Warna-warni

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam
Fadli Zon menerima dan mengunjungi
tersangka dan keluarga pelanggaran UU ITE



Pemisahan Kemenakertrans Untuk Spesifikasi Pekerjaan

Pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertrans) menjadi dua kementerian merupakan langkah tepat untuk mengarahkan ruang lingkup pekerjaan menjadi lebih spesifik.

Anggota F-PDI Perjuangan DPR Imam Suroso, menilai, Kementerian Tenaga Kerja yang tidak lagi digabung dengan transmigrasi memudahkan pekerjaan kementerian untuk fokus menangani angka pengangguran yang terus meningkat. Pembukaan lapangan kerja pun bisa lebih fokus lagi dilakukan.

“Pemisahan itu bisa lebih spesifik. Kementerian Tenaga Kerja cukup urus pengangguran saja,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/10). Sementara itu, urusan transmigrasi dilebur ke Kementerian Desa dan PDT. Ini juga penggabungan yang tepat. Desa-desa,



Anggota F-PDI Perjuangan DPR Imam Suroso

memang, selalu berada di daerah tertinggal. Sekaligus urusan transmigrasi juga bisa diarahkan ke daerah-daerah tertinggal tersebut.

“Para transmigran yang kelak mungkin akan ditempatkan di daerah-

daerah tertinggal harus diberi keterampilan kerja dan anggaran yang cukup,” imbuh Imam. Dua menteri di dua kementerian ini, lanjut Imam, harus mengembangkan ide-ide Presiden Jokowi dengan baik. Dengan begitu, dua kementerian ini akan berkinerja baik di masa depan.

Sementara itu mengomentari Menteri Kesehatan yang baru Nila Djuwita Anfasa Moeloek, menurut Imam, dia dokter senior yang tahu kebutuhan masyarakat. Di tangan Nila, program BPJS Kesehatan harus sukses. “Kita tidak menginginkan dengan BPJS Kesehatan ini rumah sakit dan dokter merasa rugi. Kalau sampai dirugikan, dampaknya bisa merugikan masyarakat pula, karena pelayanan kesehatannya jadi tidak maksimal,” kilah Imam.

(mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Achmad Hafisz Tohir Pimpin Komisi VI DPR

Anggota F-PAN DPR Achmad Hafisz Tohir terpilih sebagai Ketua Komisi VI DPR. Dia akan memimpin komisi yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan koperasi untuk 5 tahun kedepan.

Rapat penetapan Pimpinan Komisi VI ini dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (29/8). Bersama Hafisz, ada 3 wakilnya yang juga sudah ditetapkan, yaitu Azam Azman (F-PD), Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG), dan Heri Gunawan (F-Gerindra). Dalam rapat pemilihan untuk menetapkan pimpinan Komisi VI tersebut, tak dihadiri satu pun anggota dari Koalisi Indonesia Hebat di DPR (F-PDI Perjuangan, F-PKB, F-Nasdem, dan F-Hanura).

Penetapan pimpinan komisi tersebut berlangsung singkat dalam rapat tertutup. Usai terpilih menjadi pimpinan, Hafisz langsung memimpin rapat internal. Banyak wajah-wajah baru di Komisi VI ini. Wajah incumbent juga masih banyak terlihat, seperti Refrizal (F-PKS), Primus Yustisio (F-PAN), dan Nasir Bahar (F-PAN).

Hadir pula sebagai anggota Komisi VI yang baru, Melani Leimana Suharli (F-PD) mantan Wakil Ketua MPR RI,



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Komisi VI

Adang Daradjatun (F-PKS) mantan anggota Komisi III, dan Tifatul Sembiring (F-PKS) mantan Menkominfo. Secara keseluruhan F-PG menempatkan 8 anggotanya di Komisi VI. Sementara F-Gerindra 7 anggota, F-PD 6 anggota, F-PAN 5 anggota, dan F-PKS 3 anggota. (mh)/foto:naefurodji/parle/iw.

Parpol Harus Lahirkan Kader Yang Bersih

Partai Politik (Parpol) harus mampu melahirkan kader-kader yang bersih dan berintegritas, karena mereka akan menempati posisi-posisi penting dan strategis di eksekutif maupun legislatif. Rekrutmen kader di parpol harus dibenahi kembali, agar kadernya tak berperilaku korup.

Mantan Ketua Komisi V DPR Teguh Juwarno menyampaikan hal tersebut kepada pers sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (28/10). Pernyataan Teguh itu menyusul penilaian KPK terhadap para kader parpol yang diberi warna merah dan kuning sebelum diusulkan menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo. Perilaku koruptif memang menjadi tantangan besar bagi parpol mana pun untuk melahirkan para kader bersih dan berintegritas.

“Satu tantangan berat bagi Parpol, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang bersih yang profesional. Ini artinya Parpol punya PR membuat pembinaan kader sekaligus menciptakan kader-kader yang berintegritas. Saat yang sama dia juga mempunyai kemampuan untuk bekerja di eksekutif,” kata Anggota F-PAN DPR itu.

Kader Parpol yang mendapat catatan merah dan kuning dari KPK maupun PPAK, menandakan ada yang tak beres



Politisi F-PAN Teguh Juwarno

dengan kaderisasi di internal Parpol. Dan para menteri yang kini dinilai sudah bersih di Kabinet Kerja bentukan Jokowi tentu harus menunjukkan kinerjanya yang baik. (mh) foto:iwan armanias/parle/iw.

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Harus Kerja Keras



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinilai Anggota DPR RI, Fary Djemi Francis harus bekerja lebih keras lagi, mengingat Kementerian ini sebelumnya merupakan gabungan dari dua kementerian yang dileburkan jadi satu yang sebetulnya

memiliki dua fokus pekerjaan yang berbeda. Hal tersebut diungkapkan Fary, Selasa (28/10) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kementerian itu kan sebelumnya terdiri dari dua kementerian yang dileburkan jadi satu. Sementara dua kementerian itu sebenarnya memiliki dua fokus yang berbeda. Kementerian Pekerjaan Umum lebih mengurus masalah infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Kementerian Perumahan rakyat diamanatkan oleh Undang-undang untuk fokus memenuhi kebutuhan pokok berupa papan untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Bahkan karena pentingnya perumahan itulah yang pada Pemerintahan Pak SBY lalu dibentuk Kementerian tersendiri,” papar Fary.

Fary melanjutkan bahwa saat ini dalam bidang infrastruktur, jalan nasional sudah 96-98 persennya terpenuhi dalam kondisi baik. Tetapi untuk jalan daerah kondisinya terbalik, yakni

dibawah 50 persen kondisinya rusak.

Sedangkan dalam bidang perumahan masyarakat masih membutuhkan sekitar 15-16 juta rumah. Namun pemerintah hanya bisa memenuhi sekita 300-400 rumah dalam setiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut, Fary sedikit pesimis semua akan terpenuhi. Pasalnya anggaran Kementerian tersebut juga sangat terbatas. Meski demikian, Fary tidak ingin berpikiran negatif.

“Saya tidak ingin *negative thinking*, ya kita lihat saja dulu, Presiden punya visi penggabungan itu dalam rangka apa? Tetapi sebagai anggota DPR kita harus ingatkan bahwa perumahan itu sesuatu yang harus, mau tidak mau, suka tidak suka ada kebutuhan papan harus terpenuhi. Sedangkan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia juga harus terus dibangun. Jangan sampai penggabungan itu malah tidak bisa memenuhi keduanya,” pungkasnya. (Ayu) foto:iwan armanias/parle/iw.

Jaksa Agung Harus Bisa Imbangi KPK

Anggota DPR RI, Ruhut Sitompul berharap sosok yang akan menjadi Jaksa Agung nanti bisa mengimbangi KPK. Hal tersebut diungkapkan Ruhut sesaat sebelum berlangsungnya prosesi pelepasan jenazah anggota DPR, alm Sutan Sukarnotomo di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (28/10).

“Siapa pun yang jadi Jaksa Agung yang pasti harus bisa mengimbangi KPK, jangan coba-coba kalau tidak bisa mengimbangi KPK, karena sebagaimana kita ketahui kinerja KPK saat ini telah kita acungi jempol, rakyat pun banyak mencintai kerja KPK,” ujar Ruhut.

Ruhut menambahkan bahwa Jaksa Agung merupakan kunci dari pene-



Anggota DPR Ruhut Sitompul

gakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya ia berharap agar Presiden Jokowi dalam membimbing Jaksa

Agung termasuk Kejati dan Kejari benar-benar menyejajarkan dengan KPK. Meski demikian Ruhut enggan menyebutkan nama yang pas untuk menduduki jabatan Jaksa Agung.

“Saya tidak mau bilang nama, tapi ingat hancur generasi muda karena narkoba. Semua bandar-bandar yang sudah dihukum dan divonis mati satu-pun tidak pernah di eksekusi. Jika nanti pilih Jaksa Agung, harus yang punya nyali. Semua bandar narkoba harus hitungan bulan sudah di tembak mati. Kalau perlu bandar itu di tembak mati di Monas, karena hukumannya hukuman mati toh. Biar semua pedagang, pemain takut. Ingat generasi muda kita hancur dengan narkoba,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (Ayu/arg) foto: odjie/parle/hr

Fadli Zon Tetapkan Pimpinan Komisi III



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Rapat Internal Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menetapkan Aziz Syamsudin dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua Komisi. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat setelah seluruh fraksi hanya mengusulkan satu paket pimpinan.

“Mengingat usulan Calon Pimpinan Komisi III yang telah disampaikan hanya 1 paket maka sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat 13 dalam hal hanya 1 paket Calon Pimpinan Komisi maka Pimpinan Rapat langsung menetapkan sebagai Pimpinan Komisi,” katanya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/14).

Aziz Syamsudin didampingi 3 Wakil Ketua yaitu Desmon Junaidi Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dan Mulfahri Harahap dari Fraksi PAN. Dalam pemilihan tersebut empat fraksi tidak hadir dan belum menyerahkan daftar nama anggota komisi yaitu PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem. Fraksi PPP menurut Fadli sudah menyerahkan nama namun tidak hadir dalam rapat.

“Kita sudah baca tata tertib bolak-balik, sejak paripurna kedua pun sebenarnya kita sudah bisa memutuskan (pimpinan komisi). Hanya kita terus mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat namun belum menemukan titik temu. Tadi rapat sudah quorum, secara anggota dan fraksi jadi legal tidak masalah sedikitpun,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini berharap komisi dan Alat Kelengkapan Dewan yang lain segera dapat bekerja. Ia memberikan apresiasi kepada empat pimpinan terpilih yang dinilai memiliki kompetensi. Terkait mitra kerja masing-masing komisi menurutnya segera ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat. (iky) foto: andri/parle/hr

Pimpinan Komisi IV Ditetapkan

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menetapkan Pimpinan Komisi IV DPR RI, dengan susunan Ketua Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-P Gerindra), Wakil Ketua Siti Hediati Soeharto dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), dan Viva Yoga Mauladi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Menurut Agus Hermanto, pelaksanaan penetapan pimpinan pada Alat Kelengkapan Dewan pada Komisi IV telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kita sudah sesuai dengan peraturan tata tertib DPR RI, sudah dilaksanakan, dan kita sudah mengambil keputusan," tegasnya.

Rapat yang dipimpin Agus Hermanto, Rabu (29/10), di Gedung Parlemen, tersebut, dihadiri 28 Anggota dari 53 kursi jumlah Anggota Komisi IV. Fraksi yang hadir yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyerahkan palu kepemimpinan kepada Ketua Komisi IV Edhy Prabowo

Pada acara ini tidak hadir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Nasional Demokrat,

dan Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (as)/
foto:odjie/parle/hr

Wakil Ketua DPR Pimpin Upacara Pelepasan Jenazah Anggota

DPR RI berduka, dengan meninggalnya Sutan Sukarnotomo, anggota Fraksi Partai Demokrat Selasa (28/10) dini hari karena sakit. Sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, DPR menggelar prosesi persemayaman di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto yang bertindak sebagai pemimpin upacara mengucapkan duka yang mendalam atas wafatnya almarhum. Dikatakannya, semasa hidupnya, almarhum merupakan sosok putra bangsa yang berdedikasi tinggi kepada negara, sekaligus kader partai yang sangat loyal.

"Bahkan di saat sakit pun, almarhum tetap ikut berkampanye dan terjun langsung ke masyarakat yang menjadi konstituennya hingga akhirnya beliau untuk kedua kalinya terpilih kembali



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memimpin upacara pelepasan jenazah Anggota DPR Sutan Sukarnotomo

sebagai wakil rakyat," ungkap Agus Hermanto.

Oleh karena itu atas nama Anggota

dan Setjen DPR RI, Agus mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya, diberikan tempat

yang terbaik disisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggalkan tak lupa Agus berharap untuk mengikhlaskan kepergian almarhum, karena pastinya semua insan di dunia ini pun akan kem-

bali ke haribaannya.

Setelah proses persemayaman selesai, jenazah almarhum akan dimakamkan di Sandiego Hill, Karawang,

Jawa Barat, dengan terlebih dahulu disholatkan di Masjid Baiturrahman, kompleks gedung parlemen, Senayan, Jakarta. (Ayu)foto: naefuroji/parle/hr

Kardaya Warnika Pimpin Komisi VII DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Mantan Kepala BP Migas Kardaya Warnika pimpin Komisi VII DPR yang membidangi sektor energi. Pria kela-

hiran tahun 1952 itu, merupakan tokoh migas dan anggota DPR dari Partai Gerindra. Beliau merupakan alumnus Jurusan Perminyakan dari Universitas negeri di Bandung, memiliki tiga putra dan putri ini aktif di berbagai organisasi profesi dan pernah menjadi Ketua Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI)

Berikut nama Pimpinan Komisi VII DPR yaitu Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika (Gerindra), Wakil Ketua Komisi VII DPR dari PKS Tamsil Linrung, Mulyadi (Partai Demokrat), Satya W Yudha dari (Partai Golkar).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

mengatakan, masih ada beberapa Komisi di DPR yang ditunda esok hari. "Masih ada beberapa Komisi yang harus dilaksanakan besok. Sehingga kita harus memberikan kesempatan esok hari karena pimpinan masih ada agenda lain," ujarnya.

Dengan terbentuknya pimpinan di berbagai alat kelengkapan, Agus mengharapkan, AKD dapat langsung bekerja menjalankan fungsi kedewanan. "Semua Komisi itu memiliki tantangan sendiri. Tadi mekanisme penetapan Pimpinan sudah memenuhi dan sesuai perundang-undangan, serta Tatib DPR RI," jelasnya. (si)foto: naefurodji/parle/hr

Ketua DPR Menerima Pimpinan Partai-Partai Negara Sahabat



Pimpinan DPR RI saat diwawancara wartawan

Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima Pimpinan Partai-partai Negara Sahabat seperti China, Philipina, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Malaysia dan Timor Leste, Selasa (28/10) di ruang tamu Pimpinan. Novanto mengapresiasi Perwakilan Negara-negara sahabat yang telah datang dan mengucapkan selamat terhadap proses demokrasi dan politik yang baru terjadi di Indonesia, yakni dengan terpilihnya Pimpinan DPR, serta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru.

"Selain mengapresiasi kedatangan dan ucapan selamat dari Negara-negara sahabat, saya juga mendengar beberapa masukan dan saran untuk segera ditindaklanjuti demi terjalinnya hubungan yang lebih erat lagi antara Indonesia dan Negara sahabat," ungkap Novanto.

Novanto menjelaskan, hal tersebut dapat tercipta melalui kerjasama diberbagai bidang, sebut saja kerjasama perdagangan dengan China dan Hongkong yang sejatinya telah dimulai melalui lawatannya ke China pada 2012 silam. Diungkapkan Novanto, ketika itu Presiden Xi Jinping yang belum terpilih menjadi Presiden menjanjikan berbagai kemudahan untuk masuknya produk-produk Indonesia, seperti kemudahan pajak.

Khusus untuk Malaysia, Novanto berharap agar UU Ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut tenaga kerja asing dalam hal ini TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Negeri Jiran dapat diperbaiki. Pada kesempatan itu, Novanto juga berterimakasih kepada pemerintah Malaysia yang telah membebaskan Wilfrida Soik, TKW Indonesia asal NTT yang notabene merupakan daerah pemilihan Novanto itu dari hukuman mati.

Dengan Vietnam dan Laos, Novanto mendukung terselenggaranya kerjasama *multi track*, sementara dengan Timor Leste yang bermaksud mempelajari sistem perpolitikan yang ada di Indonesia, sebagai Negara tetangga yang pernah menjadi bagian Indonesia, Novanto sangat menyambut baik keinginan tersebut. (Ayu)/foto:iwan armianas/parle/hr

Sumpah Pemuda Berkumandang di DPR

“Pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Ketiga, kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.”

Bagian penting dari Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang pernah diserukan pada 28 Oktober 1928 itu, kembali berkumandang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/14) pada saat karyawan Setjen DPR, MPR dan DPD mengikuti upacara bendera memperingati Sumpah Pemuda ke-86.

Upacara yang dipimpin oleh Pembina Upacara Sekjen DPR Winantuningtyastiti itu berlangsung khidmat. Apalagi ketika Ratna Christianingrum pegawai Biro Analisa APBN membacakan ‘Sumpah Keramat’ itu dengan suara yang lantang.

“Nilai dan semangat Sumpah Pemuda harus terus terpatrit di dalam hati sanubari segenap bangsa,” kata Sekjen yang biasa dipanggil Win saat menyampaikan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olah Raga.



Sekjen DPR Winantuningtyastiti memimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda

Sekjen juga menekankan pesan penting Menpora yang menggaris bawahi Bangsa Indonesia baru saja melewati ujian persatuan dan kesatuan pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wapres lalu. Patut disyukuri tantangan itu berhasil dilewati dengan selamat. (iky) foto: naefuroji/parle/hr



Anggota F-PD DPR Linda Megawati

Kabinet Kerja Diharapkan Penuhi Target

Kabinet Kerja yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo diharapkan bisa memenuhi harapan dan target yang dicanangkan oleh pemerintah sendiri. Seperti diketahui Jokowi telah mengisi kabinetnya dengan kaum profesional dan politisi yang diharapkan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat.

Anggota F-PD DPR Linda Megawati yang dihubungi Selasa (28/10),

berkomentar, selama SBY memerintah, Indonesia dinilai memiliki tingkat keamanan yang baik. Sektor ekonomi pun meningkat pesat. Di era Jokowi menjadi presiden ini, diharapkan bisa lebih meningkat lagi.

“Saya berharap kabinet ini bisa memenuhi harapan semua masyarakat Indonesia. Selama kepemimpinan Pak SBY, ekonomi Indonesia meningkat. Semoga Pak Jokowi bisa lebih

meningkatkan lagi,” katanya.

Masyarakat Indonesia masih menunggu dan terus melihat perkembangan ke depan terhadap kinerja para menteri yang dipilih Jokowi. “Masih kita lihat perkembangan ke depan seperti apa nantinya. Pak Jokowi juga tentu tidak tinggal diam dengan kerja

para menternya. Dan saya dari partai penyeimbang sangat menghormati hak prerogatif presiden,” papar mantan Anggota Komisi X DPR ini.

Ditambahkan Linda, Jokowi diharapkan tidak salah pilih terhadap sosok para menteri yang mengisi kabinetnya. Dan masyarakat juga ti-

dak boleh langsung menghujatnya. Soal komposisi kaum profesional dan politisi dalam kabinet, sambung Linda, memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Tapi, ini adalah Kabinet Kerja. Jadi, masyarakat dan elit politik tinggal menunggu hasil kerja para menteri ini. (mh)

Jokowi Catat Sejarah, Tempatkan 8 Wanita di Kabinet



Anggota F-Nasdem Prananda Surya Paloh

Penempatan 8 wanita dalam Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo merupakan catatan sejarah tersendiri bagi perjalanan sejarah politik di Indonesia. Ini prestasi Jokowi yang perlu diapresiasi.

Anggota F-Nasdem Prananda Surya Paloh menyatakan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Se-

lasa (28/10). “Menurut saya, Jokowi sudah membuat prestasi dalam membentuk kabinet ini. Tercatat dalam sejarah, kabinet ini menempatkan 8 wanita,” katanya. Penempatan 8 wanita tersebut merupakan penghormatan pula atas kesetaraan gender. “Ini luar biasa,” ujarnya lagi.

Seperti diketahui, kedelapan wanita yang menjabat menteri dalam Kabinet Kerja adalah Susi Pudjiastuti, Rini M Soemarno, Siti Nurbaya, Puan Maharani, Nila F Moeloek, Khofifah Indar Parawansa, Retno Lestari, dan Yohanan Yambise.

Prananda juga menilai, Jokowi telah menepati janjinya, yaitu dengan menempatkan kalangan profesional yang jauh lebih banyak daripada politisi. Ini komposisi yang ideal. Walau demikian, kalangan politisi tetap harus diakomodir agar pemerintahan Jokowi mendapat dukungan politik yang kuat di tengah sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Sementara mengomentari kursi Menteri Agama yang diisi PPP, menurut putra kandung Surya Paloh ini, tampaknya Kementerian Agama, memang, dipandang paling tepat diisi kader PPP. “Ini bukan semata politik akomodasi, tapi melihat kader PPP tersebut masih kredibel menempati kursi menteri agama. (mh), foto : naefurodji/parle/hr.

Profesionalisme Menteri Bisa Terlihat dari Kinerja

Banyaknya kaum profesional yang mengisi Kabinet Kerja belum menjamin kerjanya juga profesional. Semua bisa terlihat dari kinerjanya di kabinet nanti. Baik profesional atau politisi sama-sama sedang ditunggu kiprahnya.

Anggota F-Gerindra DPR RI Fary Djemi Francis menyatakan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/10). Wakil rakyat dari dapil NTT ini mempersilakan semua pihak untuk menilai dan memberi kesempatan kepada para menteri untuk



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis

berkerja sesuai kompetensi dan keahliannya masing-masing.

“Kita beri kesempatan mereka kerja. Apalagi sudah ada *tagline*-nya kerja, kerja, dan kerja. Kita memberikan dukungan, tetapi kita juga akan mengoreksi kalau ada hal-hal yang keluar dari jalur perjuangan untuk kepentingan rakyat. Jadi, saya kira Gerindra begitu saja bersikap,” tandas Fary.

Menurut Fary, bisa jadi para politisi malah bekerja lebih profesional dari-

pada kaum profesional sendiri. “Kita bisa melihat nanti hasil kerja dari yang namanya profesional itu. Kita bisa ukur dari kerjanya, baik politisi maupun profesional. Bisa saja dari politisi yang hasil kerjanya sesuai harapan.”

Sementara mengomentari PPP yang mendapat satu kursi di kabinet, Fary berkomentar akan melihat kiprahnya ke depan, apakah tetap bergabung dengan KMP atau KIH. Hingga saat ini belum jelas betul sikap F-PPP di DPR.

“Kita lihat nanti sikap PPP. Apakah mereka mau tetap menjadi partai penyeimbang di parlemen,” imbuh Fary mengakhiri wawancara. (mh) foto : iwan armanias/parle/iw

Para Profesional Biasa Kerja Keras dan Mandiri

Kaum profesional yang dominan mengisi kursi menteri di Kabinet Kerja patut diapresiasi, lantaran mereka terbiasa dengan pola kerja keras dan mandiri. Ini tentu akan membantu efektifitas kerja kabinet untuk mencapai target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Demikian penilaian Anggota F-PDI Perjuangan DPR Itet Tridjajati Sumarijanto yang ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/10). “Kalau kita lihat Kabinet Kerja ini diisi oleh CEO-CEO. Mereka biasa kerja keras. Kan, kebetulan yang diminta kerja keras dan cepat. Dengan latar belakang kebanyakan CEO, mudah-mudahan berhasil, karena mereka biasa kerja keras dan mandiri. Mereka adalah para pejuang,” kata Itet.

Ditanya soal pemisahan Kemendikbud menjadi dua kementerian, Itet menjawab, tidak ada masalah, karena tidak melanggar nomenklatur. Apalagi, pembagian anggarannya pun tetap jelas. Seperti diketahui Kemendikbud dibagi dua, menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, lainnya menjadi Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

“Yang namanya kementerian pendidikan dasar dan menengah sudah punya anggaran. Begitu juga Kementerian Ristek juga ada anggarannya. Tinggal bagaimana membaginya saja. Jadi, tidak masalah menurut saya,” kilah mantan Anggota Komisi X DPR itu. Dan penggabungan Ristek dengan pendidikan tinggi sangat tepat. Produk-produk hasil penelitian Ristek banyak dilahirkan dari perguruan tinggi. Apalagi ada Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat.



Anggota F-PDI Perjuangan DPR Itet Tridjajati Sumarijanto

Sementara Kementerian Kebudayaan yang digabung dengan pendidikan dasar-menengah, juga menurut Itet sangat tepat. Berkebudayaan, katanya, harus dimulai sejak dini, saat anak-anak masih duduk di sekolah dasar dan menengah. “Kebudayaan harus dimulai dari anak-anak, seperti belajar budaya etos kerja, budaya rajin belajar, budaya sopan santun, hingga budaya berkesenian dan membuat kerajinan. (mh) foto : iwan armanias/parle/hr.

Paripurna DPR Setujui Nama Anggota Fraksi di AKD

Meskipun sempat terjadi keributan, akhirnya Paripurna DPR menyetujui penetapan nama-nama Fraksi di Alat Kelengkapan Dewan.

“Jika ada perbaikan susunan Fraksi bisa disampaikan kesekjenan,” ujar

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, saat memimpin Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Selasa, (28/10).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sempat mengusulkan beberapa opsi diantaranya menunda

persetujuan alat kelengkapan dewan sampai besok pagi hingga urusan internal nama Fraksi PPP tuntas. Namun dengan prasyarat nama yang masuk tetap sah.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Totok



Jajaran Pimpinan DPR RI

Daryanto mengatakan, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan harus merujuk pada Tata Tertib pasal 20 ayat 2 yaitu bahwa dapat dibentuk oleh parpol yang memenuhi ambang batas. “Kalau ada perubahan nama usulan dari Fraksi PPP harus disampaikan kepada pimpinan. Jika tidak maka alat kelengkapan yang ada tetap sah,” ujarnya.

Setelah di ketok dapat langsung bekerja dengan agenda selanjutnya pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. (si)/foto:iwan armanias/parle/iv.

Jangan Anggap Mekanisme Voting itu Tabu

Mekanisme voting dalam penetapan Pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) jangan dianggap sebagai satu hal yang tabu.

“Voting bukan suatu yang tabu wajar saja di era demokrasi. Kita ingin agar proses penetapan pimpinan Komisi itu bisa berlanjut bisa langsung rapat karena ada penggabungan kementerian, jadi harus dibicarakan di Komisi,” ujar Anggota DPR Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat, di Gedung DPR, Selasa, (28/10).

Menurutnya, aspek musyawarah mufakat dalam penetapan pimpinan AKD tentu harus dikedepankan namun apabila tidak dapat dilakukan ada langkah voting.



Anggota DPR Michael Wattimena

Michael menambahkan, apabila pengajuan nama fraksi di AKD sudah kuorum tentunya proses selanjutnya bisa dijalankan yaitu pemilihan pada pimpi-

nan AKD di masing-masing Komisi.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, saat ini terjadi semacam kerisauan dari PDIP sebagai partai pemenang namun tidak dapat menempatkan kader terbaiknya di berbagai alat kelengkapan Dewan. “Fraksi PDIP itu memiliki 109 kursi dan lebih besar dibandingkan fraksi lain yang hanya 47 kursi, 32 kursi atau 16 kursi.” ujarnya.

Menurutnya, Fraksi PDIP memiliki hak untuk mengusulkan nama kadernya untuk menjadi pimpinan di AKD. “Ini jangan dianggap sebagai bentuk protes karena emang negara kita sudah demokratis,” terangnya.

(si)/foto:iwan armanias/parle/hr

Tiga Dampak Dari Penggabungan Kementerian

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, terdapat tiga dampak dari penggabungan kementerian yang dilakukan dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wapres JK yaitu politik, anggaran, dan sosial.

“Pasti dalam penggabungan suatu kementerian misal kehutanan dan

lingkungan hidup. Pasti ada eksekusi baik politik, anggaran, maupun sosial,” kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (28/10).

Terkait Anggaran, lanjut Agus, anggaran kementerian yang dilebur tidak mungkin mendapatkan anggaran dari jatahnya masing-masing. “Nggak



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat diwawancara wartawan



“mungkin begitu bergabung terus dia mengeluarkan anggaran dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup,” terangnya.

Menurutnya, harus ada proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jokowi harus memperhatikan dua hal diantaranya sektoral dan global,” paparnya.

Dia menambahkan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum tentu bisa komplementari dan cocok. “Jadi perlu *effort* kerja tinggi, sehingga betul-betul *match* (cocok),” ujarnya.

Soal Karyawan, terangnya, juga dapat membawa eksistensi sosial yang tidak kalah pentingnya. Karena itu, terangnya, Presiden Jokowi harus

memberikan perhatian khusus penggabungan jumlah karyawan.

“Contoh gampang eselon satu di Kementerian Kehutanan ada 10 eselon begitu juga di Kementerian LH 10, apa iya satu departemen dikelola 20 eselon satu. Ini juga merupakan efek sosial,” katanya. (si), foto : [naefurodji/parle/hr](#).

Pendidikan Akademis Menteri Juga Penting

Anggota DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih menilai positif pembentukan Kabinet Kerja yang telah disusun oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga Pemerintahan Jokowi dapat langsung bekerja. Meski demikian, ada catatan yang dinilai akan berpengaruh terhadap masyarakat ke depannya. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlemen, di Jakarta Senin (27/10).

“Saya rasa langkah untuk mengumumkan susunan Kabinetnya pada minggu kemarin cukup baik, sehingga hari ini para menteri bisa langsung bekerja. Meski demikian ada beberapa catatan yang menurut saya diluar ekspektasi atau harapan masyarakat luas, dan kemungkinan besar ke depan akan memberipengaruhi yang kurang baik bagi masyarakat,” ujar Demer, begitu Gde Sumarjaya Linggih biasa disapa.

Salah satu catatan yang dimaksud Demer dan cukup mendapat perhatian besar dari masyarakat yakni masuknya Susi Pudjiastuti yang notabene hanya mengantongi ijazah SMP. Menurut Demer, meski tidak diatur dalam undang-undang mengenai kriteria pendidikan



Anggota DPR Gde Sumarjaya Linggih

bagi seorang menteri, namun seyogyanya seorang menteri yang merupakan seorang pemimpin dapat menjadi tauladan atau contoh tidak hanya bagi staf di Kementerannya saja, melainkan juga masyarakat luas.

“Bagi saya kemampuan seseorang itu tidak hanya diukur dari pengalaman saja melainkan juga dari sisi akademis (pendidikan di sekolah formal) yang

tidak kalah pentingnya. Karena ilmu itu bisa diperoleh melalui proses *learning* atau belajar di sekolah atau lembaga formal, *experience* atau pengalaman, mentoring atau lewat guru yang membimbing atau mengajarkan pada kita, dan *observer* atau pengamatan melalui televisi, radio, dan media-media lainnya, sehingga gabungan dari semua itu lah yang pada akhirnya akan membuat individu berkualitas tinggi.” jelas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Dilanjutkannya, Jika salah satu dari keempat poin tersebut hilang, tentu ada yang kurang di dalamnya, apalagi untuk menduduki jabatan yang sangat penting, yakni seorang menteri. Tentu kekurangan itu sedikit banyak ke depannya akan berpengaruh bagi Kementerian itu sendiri dan tentu bangsa Indonesia secara keseluruhan. Meski begitu, dengan mencoba berbaik sangka, Demer mendukung Kabinet Kerja yang telah disusun Presiden Jokowi untuk bekerja secara maksimal dan memberikan bukti berupa hasil kinerja yang dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. (Ayu)/foto:[iwan armanias/parle/iw](#).



Ketua DPR RI Setya Novanto saat diwawancara wartawan

Ketua DPR Apresiasi Kabinet Baru

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengapresiasi terbentuknya Kabinet Kerja yang baru saja dilantik, sekaligus berjanji akan tetap mengawasi roda pemerintahan ini untuk ke depannya. Hal tersebut diungkapkan Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/10).

“Saya selaku Pimpinan DPR mengucapkan selamat kepada Presiden sekaligus mengapresiasi terbentuknya Kabinet Kerja. Saya berharap para menteri dapat bekerja dengan baik dan lancar,” kata Setya Novanto.

Meski demikian, ditambahkan Nov-

anto, sebagaimana tiga fungsinya DPR sebagai lembaga legislatif, selain akan memberikan dukungan dalam anggaran, dan legislasi, juga akan melakukan pengawasan.

“Yang baik tentu akan kita beri dukungan. Dan yang kurang baik tentu akan kita koreksi sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Tentu koreksi disini tidak destruktif namun koreksi yang konstruktif dan sesuai

undang-undang yang berlaku,” kata Politikus Golkar ini. (Ayu) foto: naefuroji/parle/hr

Sekjen DPR Lantik Deputi Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) oleh Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, di Operation Room, Senin, (27/10).

Kepala Biro Pimpinan Setjen DPR RI, Tatang Sutarsa dilantik menjadi Deputi Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) oleh Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, di Operation Room, Senin, (27/10).

“Kita baru sempat melaksanakan pelantikan hari ini, akibat hiruk pikuk di lingkungan parlemen, karena sebelumnya ada Pemilihan Ketua DPR RI, Ketua MPR RI dan DPD RI, setelah pelantikan ini masih ada jadwal untuk pelantikan di lingkungan Setjen DPR RI,” ujarnya kepada Parlemen.

Win mengatakan, posisi dan peran Deputi Persidangan dan KSAP sangat penting sekali bagi Kesetjen DPR RI. “Tugas Deputi tersebut salah satunya mengatur dan memfasilitasi kegiatan kegiatan persidangan juga kegiatan pimpinan serta kegiatan KSAP yang



Pengambilan Sumpah Kepala Biro Pimpinan Tatang Sutarsa

tidak mungkin berhenti,” tandasnya.

“Untuk Komisi-komisi dan alat perlengkapan lainnya di DPR RI belum terbentuk, artinya semua masih belum bisa jalan, tetapi fungsi dewan sebagai

institusi terus berjalan,” ujarnya.

Dia menambahkan, tantangan kedepan yaitu bagaimana kegiatan DPR tetap berjalan dan konstitusional. “DPR RI tetap bekerja meskipun pada sisi lain pengambil keputusan di komisi-komisi belum berjalan,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Setjen tengah melakukan pembenahan dalam menata SDM. “Saat ini, Setjen DPR RI sedang melakukan pembenahan ruang kerja anggota dewan sesuai keinginan fraksi-fraksi. Setjen DPR RI dalam bekerja tidak pernah menunggu, karena rekan-rekan saat ini sedang membenahi kearsipan dan dokumen-dokumen, sehingga ketika persidangan sudah berjalan, kami sudah siap,” terangnya.

(si) foto: naefuroji/parle/hr

Menkumham Harus Buat Terobosan



Anggota DPR Al Muzammil Yusuf

Anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menilai sejumlah permasalahan pelik telah menunggu Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja Yasona Laoly. Ia menilai

penyelesaiannya tidak bisa dengan pendekatan biasa tetapi perlu kebijakan terobosan.

“Pak Menteri kita yang baru ini perlu membuat terobosan untuk sejumlah masalah seperti kepadatan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak kunjung beres, juga masalah koordinasi antar aparat penegak hukum dengan BNN, Polisi, Jaksa, KPK,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/10/14).

Muzammil yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III meyakini Yasona Laoly yang juga pernah bertugas di Komisi Hukum DPR bisa segera dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Dinamika kerja di Kemenkumham dan mitranya Komisi III tentu sudah dipahaminya.

“Saya mencermati Pak Laoly pada saat bertugas di Komisi III berdedikasi tinggi sehingga saya nilai sudah pahamlah dengan permasalahan di Kementerian KumHAM. Jadi sekarang tinggal aksi nyata,” pungkas dia. (iky)/foto:iwan armianas/parle/iw.

DPR Akan Bahas Sikap Indonesia Atas Kasus Rohingya



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima Ketua Parlemen Agama se-dunia Imam Abdul Malik Mujahid

Eropa dan Amerika telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan resolusi yang berisi kecaman terhadap tindakan pembersihan etnis atau genosida kepada muslim Rohingya di Myanmar. Namun sangat disayangkan, justru Indonesia malah menolak resolusi itu. Padahal, Indonesia dan Myanmar merupakan negara tetangga di Asia Tenggara.

Hal ini menjadi pembahasan utama dalam diskusi antara Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon saat menerima Ketua Parlemen Agama se-dunia Imam Abdul Malik Mujahid di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu (29/10/14). Abdul Malik didampingi sejumlah intelektual muda Islam, diantaranya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud.

“Kongres Amerika adalah yang pertama akan membuat resolusi tentang Rohingya, dan meminta dukungan dari Indonesia. Namun kabarnya, Indonesia malah termasuk negara yang tidak men-support pencegahan genosida di Rohingya. Kami akan membahas ini di Komisi I DPR dan Badan Musyawarah,” jelas Fadli usai pertemuan.

Politisi Gerindra ini memastikan, jika masukan ini sudah dibahas di DPR, bahkan akan dibahas di Rapat Paripurna, maka akan menjadi sikap resmi dari Parlemen Indonesia. Sehingga, sikap Indonesia di dunia internasional sejalan dengan konstitusi, dan merupakan murni sikap dari ma-

syarakat Indonesia.

“Kita akan meminta Komisi I DPR untuk memanggil Menteri Luar Negeri, agar sikap kita sejalan dengan konstitusi kita. Kan konstitusi kita banyak membicarakan hal tentang Hak Asasi Manusia. Saya rasa masyarakat kita juga concern terhadap kasus Rohingya, supaya tidak terlibat aktif untuk mencegah genosida di Rohingya. Apalagi ini terjadi di negara kawasan Southeast Asia,” imbuh Fadli.

Ia menambahkan, soal keselamatan pengungsi itu harus dijamin, sesuai dengan prosedur UNHCR atau lainnya. “Untuk alasan kemanusiaan, pengungsi harus diberikan transit area yang baik, diperlakukan secara manusiawi, karena mereka ini adalah korban hak asasi manusia,” tutupnya.

Abdul Malik mengaku heran dengan sikap Indonesia yang menolak resolusi untuk mencegah tindakan genosida di Myanmar. Apalagi Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan anggota ASEAN.

Rencananya, Abdul Malik dan tim intelektual muda Islam akan menemui sejumlah tokoh nasional, seperti Amin Rais, Hasyim Muzadi, dan Ketua MUI, Ketua Dewan Da'wah Islam Indonesia, dan sejumlah tokoh pimpinan Ormas Islam di Indonesia untuk membicarakan tentang sikap Indonesia terhadap resolusi PBB. (sf)/foto:andri/parle/iw.



Suasana Rapat Paripurna DPR ke-7 dengan agenda Penetapan Anggota Alat Kelengkapan Dewan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Selasa (28/10) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Perwakilan Ulama se-DKI Jakarta, Selasa (28/10) Foto: Andri/Parle/Hr.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berdiskusi dengan Ketua Parlemen Agama Sedunia Imam Abdul Malik Mujahid dan beberapa intelektual muda Islam di Jakarta, Rabu (29/10) Foto: Andri/Parle/Hr.



Prosesi persemayaman dan sholat jenazah almarhum Anggota DPR RI Sutan Sukarnotomo F-PD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Selasa (28/10) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.